

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka tulisan ini dapat menyimpulkan bahwa strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Environmental Justice Foundation (EJF) dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya bukti berlakunya *boomerang pattern* dengan melangsungkan strategi politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas yang membawa implikasi perubahan perilaku aktor target. Perubahan perilaku yang dimaksud yaitu kesediaan pemerintah Ghana, sebagai aktor target, untuk mengubah kebijakannya guna mengupayakan pemberantasan praktik penangkapan ikan ilegal “Saiko” di Ghana. Namun, perlu dipahami bahwa keempat strategi yang dilakukan oleh EJF bukan merupakan suatu proses linier yang bersifat evolutif, namun adalah serangkaian strategi yang bersifat adaptif dan komplementer.

Dalam menjalankan politik informasi sebagai strategi pertama, EJF melakukan investigasi langsung untuk memperoleh data dan fakta terkait praktik Saiko di Ghana untuk kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi laporan investigasi dan film dokumenter. Selain itu, EJF memanfaatkan perkembangan teknologi dengan meluncurkan program radio bulanan pada saluran ATL 100.5 FM di Cape Coast. Upaya desiminasi informasi juga

turut melibatkan peran media internasional seperti The Guardian, The Maritime Executive, dan The Fish Site.

Strategi kedua yaitu politik simbolik melibatkan upaya pembingkaihan isu (*framing*) guna memberikan pemahaman dan menarik perhatian komunitas internasional. Dalam melaksanakan strategi ini, EJF menggunakan slogan atau jargon #StopSaikoNow pada publikasinya di sosial media. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman dan menarik perhatian komunitas internasional terkait pentingnya upaya memberantas praktik penangkapan ikan ilegal Saiko di Ghana.

Strategi selanjutnya yang dilakukan EJF adalah politik pengaruh, yang mana dalam hal ini EJF memilih negara-negara yang memiliki pengaruh dari segi material maupun moral secara strategis untuk membantu upaya advokasinya. EJF memfokuskan strategi ini kepada negara-negara Uni Eropa sebagai negara-negara importir hasil laut (*seafood*) Ghana untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan tekanan kepada pemerintah Ghana. Hasil dari strategi ini adalah diberikannya kartu kuning peringatan kedua Ghana oleh Uni Eropa pada Juni 2021 lalu.

Kemudian dalam menjalankan strategi keempat yaitu politik akuntabilitas, EJF mengharapkan pemerintah Ghana untuk menerapkan rekomendasi kebijakan seperti yang tertuang dalam *The Ten Principles for Global Transparency* dengan harapan sektor perikanan Ghana dapat

terlepas dari bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh penangkapan ikan ilegal (*IUU fishing*), khususnya dari praktik Saiko.

Dalam upaya memberantas praktik Saiko di Ghana, EJF turut melakukan sejumlah strategi lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal tersebut dilakukan melalui pengamatan terhadap aktivitas kapal penangkap ikan dan kapal berbendera Ghana dengan menggunakan sebuah perangkat lunak yang dilengkapi dengan Sistem Identifikasi Otomatis bernama ExactEarth. Selain itu, EJF juga mengembangkan aplikasi seluler bernama “DASE” yang berarti “bukti” dalam bahasa Fante yang memungkinkan para nelayan untuk mengambil gambar atau rekaman dan memberikan informasi lokasi yang tepat apabila terdapat praktik penangkapan ikan ilegal yang mereka saksikan di laut.

Keberhasilan EJF dalam upaya mengadvokasikan isu praktik Saiko di Ghana terbukti berhasil ketika pemerintah Ghana telah menentukan sikap untuk berkomitmen dalam upaya memberantas praktik penangkapan ikan ilegal Saiko dan mengambil langkah untuk meninjau kembali peraturan serta regulasi yang diterapkan dalam sektor perikanan Ghana. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Ghana atas adanya kesadaran akan pentingnya mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan dan terbebas dari bahaya praktik penangkapan ikan ilegal guna membantu menjamin kesejahteraan nelayan skala kecil serta ketahanan pangan warga negara Ghana.

## 4.2 Saran

Dalam upaya memberantas praktik “Saiko” maupun penangkapan ikan ilegal lainnya, peneliti menyarankan pemerintah Ghana untuk menerapkan sistem penomoran kapal berdasarkan mandat International Maritime Organization (IMO) dan skema pengenalan kapal nasional; menerapkan sistem identifikasi otomatis atau membuat data sistem pemantauan kapal menjadi publik; mempublikasi daftar izin dan otorisasi penangkapan ikan terbaru; mempublikasi informasi tentang penangkapan serta sanksi yang dikenakan kepada para pelaku penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, maupun kejahatan lainnya; menerapkan larangan pemindahan hasil tangkapan (*transshipment*) di laut kecuali telah diberikan izin dan tunduk pada pemantauan elektronik yang dapat diverifikasi; menghentikan penggunaan bendera kemudahan (*flags of convenience*); menyertakan ketentuan dalam undang-undang untuk mengidentifikasi warga negara yang mendukung, terlibat, atau mendapatkan keuntungan dan praktik penangkapan ikan ilegal, serta; mengadopsi langkah-langkah internasional yang menerapkan standar untuk kapal dan produk perikanan.

Selanjutnya, penelitian ini sudah mampu memberikan penjelasan tentang strategi berdasarkan konsep *Transnational Advocacy Network* dalam upaya mengadvokasikan suatu isu. Namun, penelitian di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik apabila penelitian dapat mengangkat pembahasan tentang keberhasilan atau kegagalan dari penggunaan strategi *Transnational Advocacy Network* dalam upaya advokasi isu atau pada

lokus penelitian lain. Selain itu, penelitian ini juga dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi dengan membahas implikasi amandemen undang-undang sektor perikanan terhadap upaya memberantas praktik penangkapan ikan ilegal di Ghana. Pembahasan tentang peran dari aktor-aktor lain dalam rantai pasokan hasil laut (*seafood*) Ghana atau dalam upaya mewujudkan sektor perikanan Ghana yang berkelanjutan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian pada masa yang akan datang.